

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Portal Kudus

Wilayah: Kabupaten Rembang

Kasus Pembayaran Denda Proyek MPP Rembang Belum Dibayar, Terancam Pidana

<https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/muriaan/pr-794982755/kasus-pembayaran-denda-proyek-mpp-rembang-belum-dibayar-terancam-pidana>

Portal Kudus - Menjadi sorotan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pada gedung baru Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim suaramerdeka-muria.com, ada lima rekomendasi atas temuan BPK pemeriksaan anggaran 2021 pada audit yang belum lama telah dilakukan.

Denda atas pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang yang menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata belum terbayarkan sampai sekarang.

Denda keterlambatan atas penyelesaian proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang sebesar Rp380.858.202 oleh rekanan pengerja harus secepatnya dibayarkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang, Puji Santoso.

Puji mengungkapkan, denda tersebut merupakan bagian dari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit terhadap proyek MPP.

Selain denda keterlambatan, yang masuk temuan adalah kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp49.681.288.

Menurut Puji, biasanya kalau ada temuan dari audit BPK dalam kurun waktu satu bulan harus ditindaklanjuti.

Jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti artinya bisa berlanjut ke ranah hukum.

"Orang-orang yang bermasalah hukum biasanya lalai, mengabaikan. LHP BPK sepertinya Mei, semestinya Juli (tindak lanjut) temuan audit harus sudah tuntas," terang Puji kepada Suara Merdeka pada Senin, 11 Juli 2022.

Puji menyebutkan, memang ada kekurangan bayar oleh Pemkab Rembang kepada rekanan proyek MPP sebesar sekira Rp1,8miliar.

Kekurangan bayar tersebut terjadi lantaran proyek melewati tahun anggaran.

"Kekurangan bayar seingat saya Rp1,8miliar. Sebenarnya anggaran tahun lalu penuh. Namun karena pekerjaan melangkah tahun, dana tersebut belum bisa dicairkan, masuk kas daerah. Tidak bisa otomatis langsung cair, harus dianggarkan lagi melalui APBD Perubahan 2022," papar dia.

Menurut Puji, pembayaran denda tersebut tidak bisa dipotongkan dari kekurangan bayar oleh Pemkab Rembang.

Denda keterlambatan dibayar terlebih dahulu, baru kekurangan bayar bisa dicairkan rekanan.

"Tidak mau bayar denda keterlambatan, ya uang (kekurangan bayar) tidak bisa dicairkan," imbuhnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasa Permukiman (DPKP) Rembang yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran Proyek MPP, Agus Salim saat dikonfirmasi menyatakan, perintah kaitannya kekurangan volume sudah diselesaikan.

Selain itu, soal instruksi penyelesaian denda juga sudah disampaikan kepada Pejabat Pembuatan Komitmen (PPKom).

Terkait denda keterlambatan, Agus mengakui belum dilakukan pembayaran ke kas daerah.

Sampai saat ini belum ada laporan dari PPKom kepada dirinya, terkait pembayaran denda keterlambatan itu. "Logikanya, kalau belum ada laporan PPKom ke PA, denda belum dibayar," tandasnya.

PPKom Proyek MPP, Joestinnarni saat dikonfirmasi mengenai denda keterlambatan oleh rekanan belum memberikan jawaban.***